

**PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH, BELANJA MODAL, DAN
INTERGOVERNMENTAL REVENUE TERHADAP KORUPSI PADA
PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Empris di Sumatera Dan Jawa Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19)



Skripsi Oleh:

Tarishah Nabilah

01031382025184

Akuntansi

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2024

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH, BELANJA
MODAL, DAN *INTERGOVERNMENTAL REVENUE*
TERHADAP KORUPSI PADA PEMERINTAH DAERAH
(STUDI EMPIRIS DI SUMATERA DAN JAWA SEBELUM DAN SAAT
PANDEMI COVID-19)**

Disusun oleh:

Nama : Tarishah Nabilah
NIM : 01031382025184
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

30 Juni 2024



Dr. Hasni Yusrianti, S.E. M.A.A.C., Ak
NIP. 197212152003122001

LEMBAR PENSETUJUAN SKRIPSI
PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH, BELANJA MODAL, DAN
INTERGOVERNMENTAL REVENUE TERHADAP KORUPSI PADA
PEMERINTAH DAERAH
(STUDI EMPIRIS DI SUMATERA DAN JAWA SEBELUM DAN SAAT PANDEMI
COVID-19)

Disusun oleh:

Nama : Tarishah Nabilah

NIM : 01031382025184

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah Skripsi : Akuntansi Sektor Publik

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 29 Juli 2024 dan telah memenuhi syarat untuk diterima

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 6 Agustus 2024

Ketua

Anggota



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak

NIP. 197212152003122001



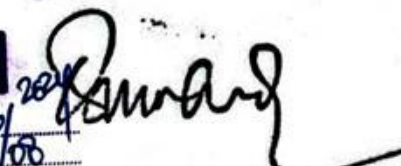
Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak

NIP. 196409031994032001

Mengetahui,
Pit. Ketua Jurusan Akuntansi

ASLI

JURUSAN AKUTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNSRI



Prof. Dr. Isnurhadi, S.E., M.B.A., Ph.D

NIP. 196211121989111001

SURAT PERNYATAAN INTEGRASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Tarishah Nabilah
NIM : 01031382025184
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Akuntansi Sektor Publik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

**PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH, BELANJA MODAL, DAN
INTERGOVERNMENTAL REVENUE TERHADAP KORUPSI PADA
PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Empiris di Sumatera Dan Jawa Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19)

Pembimbing : Dr. Hasni Yusrianti, S.E. M.A.A.C., Ak

Tanggal Ujian : 29 Juli 2024

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya.

Palembang, 16 Agustus 2024



Tarishah Nabilah
NIM. 01031382025184

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah:286)

“Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama Kita.”

(QS. At-Tauba: 40)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- Allah SWT
- Kedua Orang Tuaku
- Adikku
- Sahabat dan Teman-teman
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Pengaruh Kemandirian Daerah, Belanja Modal, Dan *Intergovernmental Revenue* terhadap Korupsi Pada Pemerintah Daerah” (Studi Empris di Sumatera Dan Jawa Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19). Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Dengan selesainya skripsi ini, penulis juga mengharapkan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi semua pihak, khususnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan untuk penelitian selanjutnya.

Palembang, 16 Agustus 2024

Penulis,



Tarishah Nabilah

NIM. 01031382025184

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada proses penyusunan dan penulisan skripsi ini pastinya tidak luput dari berbagai tantangan yang dihadapi. Namun, penulis menyadari berkat bantuan, bimbingan, doa serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
2. Bapak **Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si** selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
3. Bapak **Prof. Dr. Mohammad Adam, S.E., M.E** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Bapak **Prof. Drs. Isnurhadi, M.B.A., Ph.D** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Bapak **Dr. Muizzuddin, S.E, M.M** selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Bapak **Dr. Suhel, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
7. Ibu **Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak., CA** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan dosen pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan saya selama proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Ibu **Patmawati, S.E., M.Si., Ak., CA** selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
9. Ibu **Hj. Rochmawati Daud, M.Si., Ak.** selaku Dosen Penguji pada Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu akademis yang sangat bermanfaat selama kegiatan perkuliahan.
11. Seluruh Bapak dan Ibu Staf dan Karyawan Administrasi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah membantu melancarkan seluruh administrasi saya.
12. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda **Zarmawan** dan Ibunda **Arni** yang telah melahirkan, membesarkan, merawat, mendidik, menjaga dan memotivasi dengan memberikan semangat dan doa yang tiada henti hingga saat ini, sehingga penulis dapat meraih gelar Sarjana Ekonomi.
13. Adikku tersayang **Khairi** yang selalu memberikan dukungan baik moral, mental, waktu dan juga doa yang tiada hentinya hingga saat ini, sehingga penulis dapat meraih gelar Sarjana Ekonomi.
14. Tanteuku tersayang, ate **Leli** yang telah memberikan kasih sayang dan motivasi kepada penulis.
15. Sahabatku **Cynthia** dan **Aretha** yang selalu ada untuk penulis menjadi tempat untuk berkeluh kesah dan selalu memberikan waktu dan dukungan yang tiada henti kepada penulis. Terima kasih selalu menjadi pendengar dan selalu memberi semangat kepada penulis.

16. Sahabat semasa perkuliahanku, **Atul, Nican, Fani, Nabilah, Dian, dan Afif** yang telah memberikan waktu, tenaga, dukungan, semangat, doa, dan bantuan selama masa perkuliahan kepada penulis.
17. Teman-teman Akuntansi 2020 Universitas Sriwijaya yang sudah saling membantu dan mendukung selama menjalani perkuliahan hingga akhir.
18. Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan, masukan, dan doa kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung untuk penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak kendala serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis memohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat berguna dan dapat memberikan manfaat untuk penelitian – penelitian selanjutnya.

Palembang, 16 Agustus 2024

Penulis,



Tarishah Nabilah

NIM. 01031382025184

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Saya dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dalam bahasa Inggris dari mahasiswa :

Nama : Tarishah Nabilah

NIM : 01031382025184

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah : Akuntansi Sektor Publik

Judul Skripsi : Pengaruh Kemandirian Daerah, Belanja Modal, dan Intergovernmental Revenue Terhadap Korupsi Pada Pemerintah Daerah (Studi Empiris di Sumatera Dan Jawa Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19)

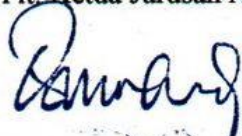
Telah saya periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan tenses-nya dan kami setuju untuk disampaikan pada lembar abstrak.

Ketua


Dr. Hasni Yusrianti, S.E. M.A.A.C., Ak

NIP. 197212152003122001

Mengetahui,
Plt. Ketua Jurusan Akuntansi



Prof. Drs. Isnurhadi, MBA, Ph.D

NIP.196211121989111001

ABSTRAK

PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH, BELANJA MODAL, DAN INTERGOVERNMENTAL REVENUE TERHADAP KORUPSI PADA PEMERINTAH DAERAH

(Studi Empris di Sumatera Dan Jawa Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19)

Oleh:

Tarishah Nabilah

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Kemandirian Daerah, Belanja Modal, Dan *Intergovernmental Revenue* terhadap Korupsi Pada Pemerintah Daerah. Jenis data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari data keuangan pemerintah daerah melalui portal DJPK dan website Mahkamah Agung. Populasi pada penelitian ini pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa pada tahun 2017-2022. Sedangkan sampel penelitian ini sebanyak 96 sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan analisis linear berganda dengan bantuan *software* Eviews 12. Hasil penelitian menyatakan Kemandirian Daerah, Belanja Modal, Dan *Intergovernmental Revenue* berpengaruh signifikan positif terhadap Korupsi Pada Pemerintah Daerah di Sumatera dan Jawa dan terdapat perbedaan antara Kemandirian Daerah, Belanja Modal, dan *Intergovernmental Revenue* pada Pemerintah Daerah di Wilayah Sumatera dan Jawa pada sebelum pandemi Covid-19 dan saat pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Kemandirian Daerah, Belanja Modal, Intergovernmental Revenue, korupsi, Kecurangan

Dosen Pembimbing,



Dr. Hasni Yusrianti, S.E. M.A.A.C., Ak
NIP. 197212152003122001

Mengetahui,

Plt. Ketua Jurusan Akuntansi



Prof. Drs. Isnurhadi, M.B.A., Ph.D.
NIP.196211121989111001

ABSTRACT

THE EFFECT OF REGIONAL INDEPENDENCE, CAPITAL EXPENDITURE, AND INTERGOVERNMENTAL REVENUE ON CORRUPTION IN LOCAL GOVERNMENTS

(Empirical Study in Sumatra and Java Before and During the Covid-19 Pandemic)

By:

Tarishah Nabilah

This study aims to obtain empirical evidence regarding the effect of Regional Independence, Capital Expenditure, and Intergovernmental Revenue on Corruption in Local Government. The type of data in this study uses secondary data obtained from local government financial data through the DJPK portal and the Supreme Court website. The population in this study was local governments in Sumatra and Java in 2017-2022. While the sample of this study was 96 samples using purposive sampling method. The results of this study state that Regional Independence, Capital Expenditure, and Intergovernmental Revenue have a significant positive effect on Corruption in Local Governments in Sumatra and Java and there are differences between Regional Independence, Capital Expenditure, and Intergovernmental Revenue in Local Governments in the Sumatra and Java Regions before the Covid-19 pandemic and during the Covid-19 pandemic.

Keyword: Regional Independence, Capital Expenditure, Intergovernmental Revenue, Corruption, Fraud

Advisor,



Dr. Hasni Yusrianti, S.E. M.A.A.C., Ak
NIP. 197212152003122001

Asknowledge,

Plt. Head of Accounting Departement



Prof. Drs. Isnurhadi, M.B.A., Ph.D.
NIP.196211121989111001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Mahasiswa : Tarishah Nabilah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 2 November
2002 Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Komplek Citra Damai II, Blok F.17
Email : tarishahnabilah@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Muhammadiyah 6 Palembang
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 10 Palembang
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 6 Palembang
Perguruan Tinggi : S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Sriwijaya

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun Ajaran 2020-2023 : Kursus Akuntansi Prospek Palembang

PENGALAMAN ORGANISASI

2022-2023 : Staff Divisi Kajian Aksi Strategi BEM KM
FE UNSRI

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRASI KARYA ILMIAH.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Teori Agensi.....	9
2.2 Fraud	10
2.3 Kemandirian Daerah	11
2.4 Pendapatan Asli Daerah	12
2.5 Belanja Modal.....	14
2.6 Intergovernmental revenue	14
2.7 Korupsi.....	15
2.8 Penelitian Terdahulu.....	16
2.9 Kerangka Pemikiran	22

2.10	Pengembangan Hipotesis.....	23
2.10.1	Pengaruh Kemandirian Daerah terhadap korupsi pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa.	23
2.10.2	Pengaruh belanja modal terhadap korupsi pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera.....	24
2.10.3	Pengaruh <i>Intergovernmental revenue</i> terhadap korupsi pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa	26
2.10.4	Pengaruh kemandirian daerah, belanja modal, intergovernmental revenue pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa pada sebelum pandemi covid-19 dan saat pandemi covid-19.	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		30
3.1	Ruang Lingkup Penelitian	30
3.2	Rancangan Penelitian.....	30
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	31
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.5	Populasi dan Sampel.....	32
3.6	Teknik Analisis Data.....	33
3.6.1	Statistik Deskriptif.....	34
3.6.2	Regensi Data Panel.....	35
3.6.3	Uji Model Regensi.....	38
3.6.3.1	Uji Chow.....	38
3.6.3.2	Uji Hausman	38
3.6.3.3	Uji Lagrange Multiplier.....	38
3.6.4	Uji Asumsi Klasik.....	39
3.6.4.1	Uji Normalitas.....	39
3.6.4.2	Uji Multikolinieritas	40
3.6.4.3	Uji Autokorelasi.....	41
3.6.4.4	Uji Heteroskedastisitas	41
3.6.5	Uji Hipotesis.....	42
3.6.5.1	Koefisien Determinasi (R ²).....	42
3.6.5.2	Uji Simultan (Uji F).....	43
3.6.5.3	Uji Parsial (Uji t).....	43
3.6.5.4	Hasil Beda Berpasangan atau Uji Wilcoxon.....	43
3.7	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	44

3.7.1	Variabel Independen (Variabel Bebas)	44
3.7.2	Variabel Dependen (Terikat).....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		48
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	48
4.2	Analisis Hasil Penelitian.....	49
4.2.1	Statistik Deskriptif.....	49
4.2.2	Estimasi Regresi Data Panel.....	51
4.2.2.1	Estimasi Common Effects Model (CEM).....	51
4.2.2.2	Estimasi Fixed Effects Model (FEM).....	52
4.2.2.3	Estimasi Random Effects Model (REM).....	54
4.2.3	Hasil Uji Pemilihan Model Estimasi	55
4.2.3.1	Uji Chow.....	55
4.2.3.2	Uji Hausman	56
4.2.4	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	57
4.2.4.1	Uji Normalitas.....	57
4.2.4.2	Uji Multikolinearitas.....	58
4.2.4.3	Uji Autokorelasi.....	59
4.2.4.4	Uji Heteroskedastisitas	59
4.2.5	Hasil Analisis Regensi Data Panel	60
4.2.6	Hasil Uji Hipotesis	62
4.2.6.1	Koefisien Determinasi (R^2).....	62
4.2.6.2	Uji Simultan (Uji F).....	62
4.2.6.3	Uji Parsial (Uji t).....	63
4.2.6.4	Hasil Beda Berpasangan atau Uji Wilcoxon.....	64
4.3	Pembahasan Penelitian	66
4.3.1	Pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Korupsi pada Pemerintah Daerah di Wilayah Sumatera dan Jawa.....	66
4.3.2	Pengaruh Belanja Modal terhadap Korupsi pada Pemerintah Daerah di Wilayah Sumatera dan Jawa.....	68
4.3.3	Pengaruh Intergovernmental Revenue terhadap Korupsi pada Pemerintah Daerah di Wilayah Sumatera dan Jawa.....	69
4.3.4	Perbedaan Kemandirian Daerah, Belanja Modal, dan <i>Intergovernmental Revenue</i> pada Pemerintah Daerah di Wilayah Sumatera dan Jawa pada Sebelum Pandemi Covid-19 dan Saat Pandemi Covid-19.	71

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	74
5.3 Saran	75
5.4 Implikasi Penelitian	76
5.4.1 Implikasi Teoritis.....	76
5.4.2 Implikasi Praktis.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 3.1 Populasi dan Sampel	33
Tabel 3.2 Definisi Operasioal variable.....	46
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Sampel Penelitian (Ribu Jiwa).....	48
Tabel 4.2 Daftar Pengadilan Tinggi Tipikor.....	49
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	50
Tabel 4.4 Hasil Estimasi <i>Common Effect Model</i> (CEM)	51
Tabel 4.5 Hasil Estimasi <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	52
Tabel 4.6 Hasil Estimasi <i>Random Effect Model</i> (REM)	54
Tabel 4.7 Hasil Uji Chow.....	56
Tabel 4.8 Hasil Uji Hausman	56
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikonearitas	58
Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi.....	59
Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	59
Tabel 4.12 Hasil Regresi Data Panel.....	60
Tabel 4.13 Hasil Uji Parsial (Uji t).....	63
Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas Variabel	65
Tabel 4.15 Hasil Uji Wilcoxon.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	22
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Daerah Sampel	81
Lampiran 2. Hasil Tabulasi Data	81
Lampiran 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif	88
Lampiran 4. Hasil Estimasi <i>Common Effect Model</i> (CEM)	88
Lampiran 5. Hasil Estimasi <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	89
Lampiran 6. Hasil Estimasi <i>Random Effect Model</i> (REM)	90
Lampiran 7. Hasil Uji Chow	91
Lampiran 8. Hasil Uji Hausman	91
Lampiran 9. Hasil Uji Normalitas	92
Lampiran 10. Hasil Uji Multikonearitas	92
Lampiran 11. Hasil Uji Autokorelasi	92
Lampiran 12. Hasil Uji Heteroskedastisitas	92
Lampiran 13. Hasil Uji Analisis Regresi Data Panel	93
Lampiran 14. Hasil Uji Normalitas Variabel	94
Lampiran 15. Hasil Uji Wilcoxon	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memasuki tahun 2020, sebuah fenomena yang sangat besar melanda hampir di seluruh belahan dunia dan termasuk Indonesia yaitu Pandemi Covid-19. Fenomena ini dinyatakan sebagai peristiwa paling menggemparkan yang menyebabkan kelumpuhan diberbagai aspek salah satunya sangat berdampak pada sektor keuangan. Kondisi Perekonomian global sebelum adanya Pandemi Covid-19 masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Covid-19 telah mengubah kehidupan sosial ekonomi dunia secara drastis serta mengubah arah perekonomian global maupun nasional yang awalnya membaik malah keterbalikannya hingga dapat dikatakan menuju resesi. Pada saat kondisi seperti ini membuat peluang untuk tindak pidana korupsi khususnya pada pemerintah daerah cukup rentan untuk terjadi, dengan penyelewengan anggaran pada masa covid-19.

Salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi hampir setiap negara di dunia termasuk Indonesia adalah korupsi. Suatu tindakan dapat digolongkan sebagai tindakan korupsi jika tindakan tersebut dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara demi keuntungan diri sendiri atau orang lain (Pemerintah Indonesia, 1999). Menurut Muhtar et al., (2018), Karena meningkatnya kebutuhan masyarakat akan keterbukaan dan transparansi informasi publik, kasus korupsi sektor publik menjadi topik diskusi. Hal ini disebabkan oleh persepsi masyarakat bahwa mereka mempunyai wewenang mengetahui bagaimana dana pajak yang telah didistribusikan kepada pemerintah dapat dialokasikan, karena dana tersebut

seharusnya dapat mendukung pembangunan negara dan pembangunan masyarakat. Sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah terhadap penyaluran dana yang telah dikontribusikan.

Berdasarkan laporan kasus korupsi dari asosiasi Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2018, pemerintah daerah merupakan entitas yang paling erat hubungannya dengan pemerintah pusat dan lembaga negara banyak terjadinya kasus korupsi. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh ICW pada tahun 2022 menunjukkan bahwa kasus korupsi terbanyak di Indonesia wilayah di Indonesia yaitu Jawa Timur di urutan pertama, diikuti Jawa Barat pada peringkat ke 2, Aceh menduduki peringkat ke 4 di Indonesia sebagai wilayah dengan kasus korupsi di ikuti dengan wilayah Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Sumatera Utara secara berutan masuk dalam 8 besar Provinsi dengan kasus korupsi terbanyak. Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang desentralisasi, pemerintah pusat dapat mendelegasikan tanggung jawab kepada pemimpin daerah untuk mengelola dan mengawasi kegiatan pemerintah daerah, termasuk urusan keuangan. Salah satu mekanisme pengawasan yang digunakan pemerintah pusat adalah melalui evaluasi laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah. Laporan keuangan berperan penting sebagai sarana bagi pemerintah daerah untuk bertanggung jawab atas penggunaan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah (Trisaptya et al., 2016). Praktik korupsi pun merembet ke tingkat daerah akibat desentralisasi pengelolaan keuangan pemerintah. (Najahningrum, 2013)

Pada kenyataannya, sistem pemerintahan daerah di Indonesia terus memberikan jalan bagi korupsi sistematis yang berdampak pada hampir setiap aspek organisasi. (Maria et al., 2018). Laporan kasus korupsi dari asosiasi Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2018 menunjukkan hal tersebut, dengan menyebutkan berbagai peristiwa Korupsi yang dilakukan secara sistematis yang dilakukan secara massal dan mendapat liputan luas oleh media pada tahun 2018. Seperti kasus yang baru baru ini sedang hangat di bicarakan di media masa yaitu kasus suap yang melibatkan 6 anggota DPRD Jambi yang juga melibatkan Gubernur yang aktif pada saat itu yaitu Zumi zola guna untuk melancarkan aksinya zumi zola memberikan uang kepada para anggota DPRD sebesar 200 Juta rupiah guna untuk RAPBD menjadi APBD Jambi Tahun 2017-2018 dimana zumi zola telah menyiapkan uang sebesar 13 Miliar rupiah sebagai iming-iming hadiah dari pengesahan RAPBD menjadi APBD Tahun 2017-2018 Jambi.

Jika dilihat Secara keseluruhan, kasus dari tindak pidana korupsi yang terjadi di Sumatera pada sebelum dan saat terjadinya covid-19 mengalami penurunan walau tidak secara signifikan. Hal ini dibuktikan dengan dengan data yang di ambil dari website Mahkamah Agung Kasus korupsi di wilayah Sumatera dan jawa sebelum terjadinya covid-19 rentan tahun 2017-2019 terjadi sebanyak 494 kasus korupsi dan pada saat covid 19 rentan tahun 2020-2022 terjadi sebanyak 510 kasus korupsi. Masih tingginya kasus korupsi yang melibatkan pemerintahan daerah menunjukkan bahwa inspektorat memiliki keterbatasan dalam independensi dan efektivitasnya dalam mengawasi dan memberikan arahan di tingkat daerah.

Korupsi merupakan salah satu bentuk dari berbagai jenis kecurangan, yang meliputi penyalahgunaan aset dan kecurangan dalam pelaporan keuangan (Romney & Steinbart, 2015). Fraud secara garis adalah suatu tindakan kecurangan atau tindakan penipuan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dalam rangka menguntungkan diri sendiri. Fraud di sektor swasta ditandai sebagai pelanggaran terhadap kebijakan organisasi dan wewenang pemimpin untuk memutuskan apakah akan menyelesaikan perselisihan secara hukum ataupun tidak ((Maria et al., 2019). Untuk arti tentang fraud dalam penulisan ini menggunakan definisi dari (Tunakotta, 2010) yang mendefinisikan fraud yang terjadi di pemerintah sebagai suatu perbuatan menentang hukum yang tunduk pada peraturan yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kemandirian daerah sendiri di gunakan sebagai salah satu variable dalam penelitian ini dikarenakan menurut penelian terdahulu (Maria et al., 2018) variable kemandirian daerah dapat menjadi salah satu variable untuk mengukur fraud dalam hal ini adalah korupsi yang ada di Indonesia, dengan mengukur kemandirian daerah dengan melihat kondisi ketergantungan pemerintah daerah pada sumber pendanaan lain. Untuk belanja modal digunakan dalam penelitian kali ini dikarenakan menurut penelitian terdahulu (Corrado & Rossetti, 2018) menunjukkan bahwa belanja modal memiliki peranan yang cukup besar terhadap terjadinya penyalahgunaan dana dalam belanja modal. Dan untuk *intergovnment revenue* menurut penelitian terdahulu (Masdiantini & Erawati Ni, 2020) memiliki peluang yang cukup besar dalam tindak pidana korupsi Dimana penggunaan dana dari

pusat ke daerah dinilai memiliki potensi yang cukup tinggi untuk di salah gunakan oleh aparat sipil negara.

Mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017, menyatakan bahwa Untuk menghasilkan pandangan pemeriksaan yang secara akurat mewakili kualitas laporan keuangan pemerintah, keuangan negara ditempatkan, diteliti, dan dievaluasi dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai kecurangan di sektor swasta, kecurangan dikaitkan dengan tingginya tekanan finansial, rasio transaksi yang rumit, masalah integritas manajer, atau perselisihan antara perusahaan dan auditor (Lou dan Ming, 2019). Tekanan dari luar dan kestabilan keuangan bisa menjadi pemicu terjadinya tindakan fraud. Berdasarkan studi tentang segitiga fraud dan kecurangan di sektor publik, korupsi di sektor publik Nigeria dipengaruhi secara positif oleh komponen-komponen segitiga fraud. (Abdullahi & Mansor, 2018) dan di Indonesia (Maria dan Gudono, 2017). Pegawai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di kabupaten atau kota tertentu masih menjadi sumber informasi utama dalam penelitian sebelumnya mengenai fraud yang terjadi pada pemerintah daerah di Indonesia((Didi & Kusuma, 2018; Rustiarini et al., 2019). Untuk dapat mendeteksi adanya fraud pada pemerintah daerah tidak dapat diimplementasikan melihat hasil dari penelitian pada mendeteksi fraud pada sektor swasta (Maria et al., 2019). Hal ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik dan tujuan pengukuran dua sektor, sektor publik menawarkan layanan publik,

sedangkan sektor swasta mengejar keuntungan.

Saat ini penelitian sekunder tentang fraud di sektor pemerintah daerah yang terjadi di Indonesia masih cukup sedikit dan perbedaan kondisi perekonomian pada saat situasi pandemi covid-19 dan sebelum covid-19. Kondisi inilah yang memicu dilakukannya penelitian empiris yang diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pada situasi pandemi dan sebelum pandemi covid-19 terhadap terjadinya fraud di pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Karena begitu luasnya ruang lingkup maka penulis mengambil sampel penelitian dalam skala yang lebih kecil yaitu mencakup wilayah Sumatera dan Jawa karena kedua wilayah ini menjadi wilayah dengan kasus korupsi tertinggi di Indonesia. Penelitian ini akan meneliti kemandirian daerah, belanja modal, dan *intergovernmental revenue* yang mempengaruhi terjadinya spekulasi di pemerintah wilayah Sumatera dan Jawa pada sebelum dan saat terjadi covid 19 dengan mengembangkan hasil penelitian dari Muhtar et al., (2018).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kemandirian daerah, belanja modal, dan *Intergovernmental revenue* terhadap Korupsi Pada Pemerintah Daerah (Studi empiris di Sumatera dan Jawa sebelum dan saat pandemi covid-19)”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kemandirian daerah berpengaruh terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah wilayah Sumatera dan Jawa ?
2. Bagaimana belanja modal berpengaruh terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah wilayah Sumatera dan Jawa?

3. Bagaimana *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah wilayah sumatera dan jawa ?
4. Apakah terdapat perbedaan perbedaan kemandirian daerah, belanja modal, *intergovernmental revenue* sebelum dan saat terjadinya pandemi covid-19 pada pemerintah daerah di wilayah sumatera dan jawa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh kemandirian daerah terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah wilayah Sumatera dan jawa.
2. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh belanja terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah wilayah sumatera dan jawa.
3. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah wilayah sumatera dan jawa.
4. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh covid-19 terhadap perbedaan kemandirian daerah, belanja modal, *intergovernmental revenue* pada pemerintah daerah wilayah sumatera dan jawa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, menurut teori keagenan yang diterapkan dalam penelitian ini, masyarakat berperan sebagai prinsipal dan dalam hal ini pemerintah daerah sebagai agen. Dalam hal ini kewenangan masyarakat (*principal*) harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah (*agent*). Selain itu, hal ini juga

akan menjadi panduan bagi kemajuan keahlian akuntansi di sektor publik sehubungan dengan potensinya dalam mengurangi korupsi yang masih merajalela di Indonesia. Temuan penelitian ini diyakini dapat menjadi masukan bagi penyelidikan di masa depan mengenai pentingnya keterbukaan dalam pemerintahan di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis untuk menambahkan referensi bagi pemerintah sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan tentang upaya penanganan korupsi di wilayah kewenangannya. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberi masukan bagi entitas yang berwenang untuk menentukan pedoman terkait dengan transparansi pada pemerintahan di Indonesia. Dimana pemerintah daerah (*agent*) harus mempertanggungjawabkan wewenang yang telah diberikan oleh masyarakat (*principal*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi, R., & Mansor, N. (2018). Fraud prevention initiatives in the Nigerian public sector: Understanding the relationship of fraud incidences and the elements of fraud triangle theory. *Journal of Financial Crime*, 25(2), 527–544. <https://doi.org/10.1108/JFC-02-2015-0008>
- Ahyaruddin, M., & Azmi, Z. (2019). The Role of Government Auditing in Corruption Control and Its Impact on Government Performance and Tax Revenue. *International Conference of CELSciTech 2019 - Social Sciences and Humanities Track (ICCELST-SS 2019)*, 373, 74–79. www.kemenkeu.go.id,
- Arsandi, S. A. (2023). The grease of the wheel: The correlation between corruption, regional revenue and expenditure in Indonesia. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(2), 193–204. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.938>
- Arfath, D. M., & Priyono, N. (2023). Analisis Perbandingan Rasio Kinerja Keuangan Pemprov DKI Jakarta Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 440–451. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Arsandi, S. A. (2023). The grease of the wheel: The correlation between corruption, regional revenue and expenditure in Indonesia. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(2), 193–204. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.938>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2017). *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*.
- Didi, D., & Kusuma, I. C. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN (FRAUD): PERSEPSI PEGAWAI PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BOGOR. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 15(1), 1–20. <https://doi.org/10.21002/jaki.2018.01>
- Corrado, G., & Rossetti, F. (2018). Public corruption: A study across regions in Italy. *Journal of Policy Modeling*, 40(6), 1126–1139. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2018.01.001>
- Fisman, R., & Gatti, R. (2002). Decentralization and corruption: Evidence across countries. *Journal of Public Economics*, 83(3), 325–345.
- Hidayah, R., Imtikhanah, S., & Ahsanul Habibi, K. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Saat

- Pandemi Covid19. *Neraca*, 17(1), 122–147.
<https://doi.org/10.48144/neraca.v17i1.598>
- Huda, A. M. (2023). Strategi Realokasi Anggaran sebagai Referensi Struktur Anggaran Daerah yang Efisien. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 8(3), 205–217.
<https://doi.org/10.33105/itrev.v8i3.597>
- Imtinan, G., & Hasibuan, D. H. (2021). Pengaruh Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Kementerian. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(2), 215–224.
<https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.488>
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2022). Indonesia Corruption Watch - Laporan Tahunan 2022. <https://www.antikorupsi.org/id/article/laporanakhir-tahun-icw-2022>
- Liu, Y., & Feng, H. (2015). *Tax Structure and Corruption: Cross-Country Evidence*. <http://aysps.gsu.edu/isp/index.html>
- Mahkama Agung. (n.d.). *Direktorat Putusan Mahkamah Agung*. Retrieved March 2, 2024, from <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>
- Maria, E., & Halim, A. (2021). E-GOVERNMENT DAN KORUPSI: STUDI DI PEMERINTAH DAERAH, INDONESIA DARI PERSPEKTIF TEORI KEAGENAN. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 5(1), 40–58.
<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i1.4789>
- Maria, E., Halim, A., Suwardi, E., & Miharjo, S. (2019). EXPLORATION OPPORTUNITIES TO COMMIT FRAUD IN LOCAL GOVERNMENTS, INDONESIA. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 16(1), 1–16.
<https://doi.org/10.21002/jaki.2019.01>
- Masdiantini, P., & Erawati Ni. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(2), 1150–1182.
- Maria, E., & Halim, A. (2021). E-GOVERNMENT DAN KORUPSI: STUDI DI PEMERINTAH DAERAH, INDONESIA DARI PERSPEKTIF TEORI KEAGENAN. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 5(1), 40–58.
<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i1.4789>
- Maria, E., Halim, A., Suwardi, E., & Miharjo, S. (2019). EXPLORATION OPPORTUNITIES TO COMMIT FRAUD IN LOCAL GOVERNMENTS,

- INDONESIA. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 16(1), 1–16.
<https://doi.org/10.21002/jaki.2019.01>
- Muhtar, Sutaryo, & Sriyanto. (2018). Corruption in Indonesian local government: Study on triangle fraud theory. *International Journal of Business and Society*, 19(2), 536–552. <https://www.researchgate.net/publication/327403571>
- Najahningrum, A. F. (2013). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FRAUD: PERSEPSI PEGAWAI DINAS PROVINSI DIY. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 259–267. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>
- Nuruddin, M., & Rahmawati, I. P. (2021). Fraud Triangle dan Korupsi Pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *JRAK*, 12(1), 110–124.
- Nurchayyo, A. D., & Mahi, B. R. (2022). Analisa Dana Transfer Pusat dan Probabilitas Terjadinya Korupsi di Tingkat Pemerintah Daerah. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 95–102.
<https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.862>
- Nuruddin, M., & Rahmawati, I. P. (2021). Fraud Triangle dan Korupsi Pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi (JRAK)*, 12(1), 110–124.
- Pemerintah Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Perbendaharaan, J., Negara, K., & Kebijakan, D. A. N. (2021). Faktor-faktor penentu korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(4), 317–328. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i4.410>
- Rahayuningtyas, D. P. A., & Setyaningrum, D. (2018). Pengaruh Tata Kelola Dan E-Government Terhadap Korupsi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(4), 431–450.
<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597>
- Rahmasari, A., & Setiawan, D. (2021). The Determinants of Frauds in Local Governments. *JDA Jurnal Dinamika Akuntansi*, 13(1), 37–50.
<https://doi.org/10.15294/jda.v13i1.29137>
- Rayhan Alfansa. (2022). *ANALISIS KEMANDIRIAN DAN EFEKTIVITAS KEUANGAN DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19*. 4(3), 150–167.

- Rini, R., & Damiati, L. (2017). Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1), 73–90. <https://doi.org/10.24815/jdab.v4i1.4933>
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2015). *Accounting Information Systems*. Pearson.
- Suhardjanto, D., & Yulianingtyas, R. R. (2011). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 8(No. 1), 30–42.
- Suhardjanto, D., Rusmin, Mandasari, P., dan Brown, A. (2010). *Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Characteristics: Evidence from Indonesian Municipalities*. Penelitian Hibah Publikasi Internasional, LP2M UNS.
- Syahara, B. Q., & Aufa, M. (2022). *Provinsi Jawa Timur Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19*. 38(1), 27–38.
- Umeh, J. C., Kyarem, R., & Iyoboyi, M. (2013). Beneficial Grease Hypothesis of Public Sector Corruption in Economic Development: The Nigerian Experience Beneficial Grease Hypothesis of Public Sector Corruption in Economic Development : The Nigerian Experience. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 4(16), 14–28.
- Trisaptya, Y., Perdana, H. D., & Sulardi. (2016). EVALUASI AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(1), 75–86.
- Tunakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif* (Vol. 431). Salemba Empat.
- Wicaksono, G. S., & Prabowo, T. J. W. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1016–1028. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710>
- Zainudin, E. F., & Hashim, H. A. (2016). Detecting fraudulent financial reporting using financial ratio. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 14(2), 266–278. <https://doi.org/10.1108/jfra-05-2015-0053>